**

**Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Kahakitang Kecamatan Tatoareng Kabupaten Kepulauan Sanngihe**

*Jurnal Administrativus Vol 2 No 2, E-ISSN 3026-3018*

*© Tahun IAN FIS UNIMA. All right reserved*  *ISSN*

**Nofri Markus Taidi1, A. R. Dilapanga2, Marthinus Mandagi3**

**123 Prodi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Manado, Indonesia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I N F O A R T I K E L |  | A B S T R A C T |
| ***Key word:***  ***Society Participation,***  ***Infrastructure Development and Clean Water Facilities, Kabupaten Sangihe***  Accepted: 23 April 2024  Revised : 28 April 2024  Published: 30 April 2024 |  | ***The purpose of this research that is to know, describe and analyze. How about community participation in the construction of clean water facilities in kahakitang village, tatoareng district, sangihe archipelago regency? This research uses qualitative descriptive method. Data is collected via observation technique, interview and documentation.***  ***The results of this study there is a problem causing disruption of development clean water infrastructure, namely the problem of difficult participation or less from society for existing developments whether it’s participation in the form of energy, thoughts and money. And planning in infrastructure development which is less than optimal, bad relationship from the government as well as the village community. Leader with character top down, wouldn’t want to hear better imput. Then the attitude is not good from society that there is no sense of belonging for clean water facilities which exists.*** |
|  |
|  |
|  |  | INTISARI |
| *Partisipasi Masyarakat, Pembangunan Infrastruktur, Fasilitas air bersih, Kabupaten Sangihe* |  | Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana air bersih di desa kahakitang kecamatan tatoareng kabupaten kepulauan sangihe? Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.Hasil dari penelitian ini terdapat masalah yang menyebabkan terganggunya pembangunan infrastruktur air bersih yaitu masalah partisipasi yang sulit atau kurang dari masyarakat terhadap pembangunan yang ada baik itu partisipasi dalam bentuk tenaga, pikiran dan uang. Dan perencanaan dalam pembangunan infrastruktur yang kurang maksimal, hubungan yang kurang baik dari pemerintah maupun masyarakat desa. Pemimpin yang berkarakter top down, tidak mau mendengar masukan yang lebih baik. Kemudian sikap yang kurang baik dari masyarakat sehingga tidak ada rasa memiliki terhadap sarana air bersih yang ada. | |

# I. Pendahuluan

Pembangunan infrasrtuktur terutama dalam sarana dan prasarana air bersih sangat di perlukan dan diperhatikan oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam pembangunan Kawasan perdesaan. Air merupakan kebutuhan pokok bagi manusia sehingga ketersediaan air bersih sangat penting untuk memenuhi hidup manusia. Penyediaan air besih tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, tetapi juga sangat berkaitan dengan kebutuhan air untuk sarana-sarana umum, social dan ekonomi sesui dengan pertambahan jumblah penduduk.

Wrihatnolo dan Dwidjowijoto “Kesejahtraan merupakan harapan manusia hidup. Kesejahteraan merupakan Langkah awal menuju kebahagiaan. Setiap manusia mempunyai pandangan yang berbeda tentang Batasan kesejahteraan karena setiap individu atau setiap kelompok manusia

mempunyai kebutuhan yang berbeda satu sama lain terhadap suatu barang dan/atau jasa. Manusia harus melakukan sesuatu Tindakan untuk mencapai kesejahteraan yang dibutuhkannya itu, sedemikian hingga, setiap individu atau kelompok manusia akan mempunyai Tindakan yang berbeda satu sama lain untuk mencapai kesejahteraan yang dubutuhkan itu.” [1]

Air merupakan suatu elemen utama di bumi yang menjadi bagian tidak terpisahkan bagi seluruh manusia. Makhluk hidup tidak dapat hidup jika tidak ada air, sehingga air sangat dibutuhkan untuk menjaga kelangsungan makhluk hidup oleh karena itu pemerintah harus dapat mengelola air dengan baik. dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pasal 1, ayat (2) tentang desa menjelaskan, bahwa pemerintah desa adalah “Penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia” [2]. Penyelenggaranya yaitu pemerintah desa yakni kepala desa dimana dalam penyelenggaraan pemerintah desa tersebut berdasarkan asas kepastian hukum, tata tertib penyelenggaraan pemerintah, tertib kepentigan umum, keterbukaan perposionalitas, profesionalitas, efektifitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif.

Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang system penyediaan Air Minum, menerangkan bahwa Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana air minum. Pengelolaan dalam pengunaan air sangat perlu agar memberikan manfaat bagi rakyatnya [3] . Dalam UU RI No 17 Tahun 2019 Bab 1 Pasal 1 Point 8 mengatakan “Pengelolaan air sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaran konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air” [4].

Partisipasi dari masyarakat merupakan suatu hal yang sangat penting, lewat partisipasi dari masyarakat sebuah kebijakan, program, tujuan, dan Visi-Misi dari pemerintah akan terimplementasi dengan baik. Jadi tidak terkecuali dengan pembangunan yang ada, setiap pembanguan yang dibuat seperti pembangunan ekonomi, pembangunan infrastruktur, pembangunan Pendidikan, pembangunan Kesehatan, ataupun pembangunan suatu sarana dan prasarana, semua pembangunan ini akan berjalan dengan baik Ketika adanya partisipasi dari masyarakat. Bahkan Ketika adanya partisipasi dari masyarakat ini merupakan suatu kerja sama yang baik untuk mencapainya suatu tujuan.

Dalam Undang-undang No 23 tahun 2014 tertuang pada pasal 1 ayat 41 menyatakan bahwa: “partisipasi masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Peran serta atau partisipasi masyarakat merupakan salah satu 3 prinsip otonomi daerah, dan daerah kabupaten / kota harus mampu meningkatkan partisipasi masyarakat”. [5]

Dalam suatu pembanguunan di dalam partisipasi masyarakat suatu elemen proses pembangunan di desa, dan dengan begitu partisipasi masyarakat dalam pembangunan diperlukan tingkatan dan dimulai dari apparat desanyayaitu dengan menggerakan masyarakat untuk berpartisipasi.

Partisipasi Merupakan hubungan dengan bawahan/kelompok yang berhubungan dengan pengambilan keputusan. Dan dalam partisipasi masyarakat ini di dasari dengan motivassi suatu individu maupun kelompok. Karena tanpa adannya motivasi yang menjadi penggerak dalam indovidu maka sangatlah mungkin partisipasi masyarakat desa akan terwujud dalam suatu pembangunan. partisipasi itu merupakan suatu kehrusan bagi masyarakat desa untuk meressponnya karena Ketika tidak ada respon yang baik bagi masyarakat sangatlah tidak mungkin suatu rencana khususnya untuk pembangunan desa dapat terlaksana.

Partisipasi yang dimaksudkan adalah partisipasi dalam bentuk uang, tenaga (gotong royong), pikiran (ide-ide, gagasan). Menurut Alex Nitisemito dalam Syaprizal [6].

Namun di desa kahakitang partisipasi bisa dikatakan belum efektif msyarakat yang masih kurangnya

47

rasa pemberian untuk kepentingan Bersama yakni masih minimnya partisipasi masyarakat terhadap sarana dan prasarana penampungan air masyarakat yang ada berfikiran bahwa pembangunan yang ada di desa hanya tangungjawab permerintah semata. dapat dilihat dengan masih kurangnya perhatian masyarkat terhadap sarana tempat penampungan air bersih, tong dimana tempat menampung air bersih untuk masyarakat di desa kurang memadai, sehingga masyarakat desa behongan sangat kekurangan air bersih untuk kehidupah sehari-hari. Dengan kekurangan air bersih masyarakat desa kahakitang sangat mengalami kesulitan dengan memiliki air untuk masak, air untuk mandi, air untuk mencuci bahkan air untuk minum sekalipun sangat sulit untuk diperoleh.

Masyarakat desa kahakitang menampung air hujan untuk dibuat menjadi air minum, ketika air hujan datang masyarakat desa behongan menjadi senang karena air hujan adalah satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan air, masyarakat desa kahakitang beramai-ramai menyiapkan wadah seperti ember, loyang, tong dan wadah yang lain yang bias dibuat untuk penampungan air hujan. Kemudian air hujan tersebut di buat masyarakat kahakitang untuk menjadikan air mandi, air untuk mencuci, bahkan di jadikan sebagai air masak dan air untuk minum.

Namun akan menjadi masalah ketika tidak ada air hujan, air hujan tidak selalu ada, bahkan sampai dengan berbulan-bulan air hujan tidak turun, ini merupakan ketakutan bagi masyarakat desa kahakitang, karena air hujan yang tidak menentu akan datang. Padahal masyarakat desa kahakitang seharusnya mendapatkan air bersih dengan layak dan tidak bergantung pada air hujan saja, karena ketika menampung air hujan yang terlalu lama dan di simpan di wadah dan tempat yang kurang baik dapat menyebabkan sarang nyamuk dan ini tidak bagus dengan kesehatan

Pada tahun 2015 pemerintah desa kahakitang sudah membangun atau mengadakan sarana prasarana tempat penampungan air besih namun entah kenapa pemerintah desa behongan kecamatan tatoareng tidak dapat merealisasikan dan tidak dapat melaksanakan dengan baik dan tidak sampai tujuan dan pembangunan sarana dan prasaran itu berlanjut sampai sekarang berkali-kali dibangun tapi tidak terlaksanakan dengan baik hinga membuat pembangunan sarana dan prasarana air bersih ini bisa dikatakat tidak sampai tujuan yang ditetapkan . Awal pembuatan sarana tempat penampungan air bersih tersebut lakukan karena pada saat itu di tahun 2015 air hujan tidak turun selama 6 (enam) bulan dan mengakibatkan sangat krisisnya air di desa kahakitang kecamatan tatoareng. Kurangnya partisipasi dari masyarakat untuk pembangunan sarana dan prasarana air bersih sangantlah berpengaruh untuk keberhasilan suatu pembangunan yang ada bahkan bisa saja pembangunan tersebut tidak sampai tujuan atau gagal.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas yang peneliti uraikan maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA KAHAKITANG KECAMATAN TATOARENG KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE”

Berdasarkan rumusan masalah diatas yang menjadi tujuan penelitan ini yaitu untuk Mengetahui, Mendeskripsikan dan Menganalisis. Bagaimana Partisipasih Masyarakat dalam Pembangunan Sarana Air Bersih di Desa Kahakitang Kecamatan Tatoareng Kabupaten Kepulauan Sangihe?

II**. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode deskriptif kualitatif, metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya eksperimen).

Sugiyono Metode kualitatif yaitu metode penelitian yang akan digunakan untuk melakukan penelitian pada keadaan obyek yang alamiah, (sebagai tandingannya adalah eksperimen) yang dimana peneliti sebagai instrumen kunci [7]. Teknik akumulasi data dikerjakan secara trianggulasi (gabungan) lebih menekankan makna padageneralisasi yaitu hasil dari penelitian kualitatif dan analisis data bersifat induktif Sugiyono [7]. Deskriktif yaitu data yang telah terkumpul seperti kata-kata dan ataupun gambar,sehingga tidak menekankan pada angka. Data yang sudah terkumpul setelah dianalisis selajutnya di deskripsikan sehigga dapat mudah dimengerti orang lain.

Penelitian ini difokuskan pada Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Sarana di Desa Kahakitang Kecamatan Tatoareng Kabupaten Kepulauan Sangihe.

* Difokuskan pada Pembangunan Sarana dan Prasarana Bak Penampungan Air, Tong Penampungan Air, dan Pipa Air di Desa Kahakitang Kecamatan Tatoareng Kabupaten Kepulauan Sangihe

48

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder yaitu :

1. Data primer ini merupakan Informasi yang diperoleh secara langsung yang dilakukan dengan observasi dan wawancara yang meliputi :
2. Kepala Desa Kahakitang
3. Pemerintah Desa Kahakitang
4. Mayarakat Desa Kahakitang
5. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari lapangan penelitian yang meliputi dokumen data yang berkaitan dengan objek penelitian dan telah terdokumentasi Data sekunder data yang bersifat studi wawancara, observasi, dan dokumentasi, atau data yang berbentuk sudah jadi. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari sumber berupa literaturliteratur berupa buku-buku, skripsi, jurnal, laporan atau data-data yang terkait dengan program penyediaan air bersih.

Teknik pengumpulan data yang akan peneliti ambil, yaitu :

1. Observasi : Untuk mengetahui tentang Peran Pemerintah Desa Dalam Upaya Pengembangan sarana Air Bersih Di Desa Kahakitang Kecamatan Tatoareng Kabupaten Kepulauan Sangihe. Observasi yang dilakukan dengan cara peneliti melihat serta mengamati kondisi peran pemerintah desa dalam upya pembangunan sarana air bersih dan bagaimana pemerintah mengelolah dan melakukan tugas serta tanggung jawabnya.
2. Wawancara : Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur (struktured interview) Dengan wawancara terstruktur ini peneliti lakukan untuk memperoleh dan mengambil data dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dengan responden dan mendengar langsung serta mencatat dengan teliti apa yang diterangkan oleh responden, metode ini digunakan untuk memperoleh data atau informasi dari beberapa sumber data yang bersangkutan diantaranya yaitu: Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Masyarakat Desa Kahakitang.
3. Dokumen : Untuk memeperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data-data serta literature yang relevan. Teknik dokumentasi ini dapat berupa gambar, file, maupun catatan penting.

Teknik Analisis Data dalam Penelitian ini Menurut Kairupan dan Mandagi “Proses analisis data yang diperoleh dari lapangan pada prinsipnya dilakukan Bersama dengan pngumpulan data. Antara keduanya tidak boleh dipisahkan, sebab pada saat pengumpulan data secra tidak langung terjadi proses analisis data. Proses selanjutnya adalah penyederhanaan data, agar supaya data dan informasi yang diperoleh dapat digunakan untuk menjelaskan permasalahan penelitian.” [8]

Berdasarkan pendapat tersebut dalam kaitannya menganalisis data kualitatif maka langkah yang ditempuh oleh penelitian adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan data : yang dimaksut dengan penyusunan data ini yaitu untuk memudahkan dalam penilaian.
2. Klasifikasi data : Data sebagai usaha untuk menggolokan data yang berdasarkan pada kategori yang diteliti Penggolongan ini disesuaikan dengan sub permasalahan yang telah dibuat sebelumnya berdasarkan analisis yang terkandung dalam masalah sendiri
3. Pengelolaan data : Data yang telah ditransip kemudian disajikan dengan cara dipisahkan dan diletaka data yang serupa kedalam bagian tertentu yang telah ditanda. Langkah selanjutnya adalah membuat rangkuman inti dari setiap aspek yang diteliti.

# III. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Di Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa belum terlalu optimal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, hal ini dilihat berdasarkan pengolahan data observasi dan juga pengolahan data-data wawancara yang dilakukan dimana pengolahan data wawancara peneliti melihat ada argumentasi yang di lontarkan dari salah satu informan mengenai dengan kinerja yaitu : masih ada staf yang mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan umum dan juga masih ada staf yang menunda-nunda pekerjaan.

49

Desa Kahakitang merupakan pulau yang terbesar di kecamatan tatoareng dimana kahakitang adalah ibu kota kecamatan Tatoareng. Berdasarkan survey dalam perhitungan luas yaitu 8,78 Km2. Dan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu 12,08 Km2 dan dilihat secara geogravis pulau kahakitang terletak pada 3 10’32” LU dan 125 31’09” BT.

Kampung kahakitang dengan batas wilayahnya yaitu:

* Utara, Kampung Daleko Bembanehe
* Selatan, Laut Sulawesi
* Timur, Laut Sulawesi
* Barat, Kampung Taleko Batusaiki

Keadaan Sosial dan Ekonomi. Dengan jumlah keseluruhan adalah 698 jiwa, dan untuk jumlah KK yaitu 203 KK. Mayoritas warga atau penduduk yang ada di pulau kahakitang beragama Kristen Protestan dan Sebagian kecilnya yaitu beragama Kristen Katolik

Jumlah penduduk di pulau kahakitang yaitu,

* Laki-laki adalah 353 jiwa
* Perempuan 345 jiwa.

Berdasarkan data yang ada untuk pekerjaan penduduk pulau kahakitang yaitu;

* Nelayan 55 KK
* Petani 112 KK
* Pegawai Negeri Sipil (PNS) 27 orang
* TNI/Polri 5 orang
* Tukang Kayu/ Bangunan 5 Orang.

Karena di pulau kahakitang yang adalah ibukota kecamatan, maka adanya kantor kecamatan Tatoareng, untuk sarana Kesehatan ada puskesmas, begitu juga dengan sarana Pendidikan di pulau kahakitang terdapat beberapa sarana Pendidikan yaitu;

* 1, PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)
* 1, TK (Taman Kanak-kanak)
* 2, SD (Sekolah Dasar)
* 1, SMP (Sekolah Menengah Pertama
* 1, SMA (Sekolah Menengah Atas)

Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Sarana Air Bersih di Desa Kahakitang Kecamatan Tatoareng Kabupaten Kepulauan Sangihe. Partisipasi dari masyarakat merupakan suatu hal yang sangat penting, lewat partisipasi dari masyarakat sebuah kebijakan, program, tujuan, dan Visi-Misi dari pemerintah akan terimplementasi dengan baik. Mandagi juga mengatakan “Banyak definisi yang dikemukakan para ahli tentang partisipasi, namun secara harafiah, partisipasi berarti; [9]

1. Turut berperan serta dalam suatu kegiatan,
2. keikutsertaan atau peran serta dalam suatu kegiiatan
3. Peran serta aktif atau proaktif dalam suatu kegiatan.”

Akan tetapi realita yang terjadi di desa kahakitang berbeda dengan yang seharusnya masyarakat lakukan dalam berpartisipasi, dari hasil penelitian yang di temukan keterlibatan masyarakat dalam mencari sumber air, proses pengolahan, dana dan tenaga bisa dikatakan kurang antusias, dan cenderung tidak mau terlibat.

Dalam suatu pembanguunan di dalam partisipasi masyarakat suatu elemen proses pembangunan di desa, dan dengan begitu partisipasi masyarakat dalam pembangunan diperlukan tingkatan dan dimulai dari apparat desanyayaitu dengan menggerakan masyarakat untuk berpartisipasi.

Partisipasi Merupakan hubungan dengan bawahan/kelompok yang berhubungan dengan pengambilan keputusan. Dan dalam partisipasi masyarakat ini di dasari dengan motivassi suatu individu maupun kelompok. Karena tanpa adannya motivasi yang menjadi penggerak dalam indovidu maka sangatlah mungkin partisipasi

50

masyarakat desa akan terwujud dalam suatu pembangunan. partisipasi itu merupakan suatu kehrusan bagi masyarakat desa untuk meressponnya karena Ketika tidak ada respon yang baik bagi masyarakat sangatlah tidak mungkin suatu rencana khususnya untuk pembangunan desa dapat terlaksana.

Partisipasi yang dimaksudkan adalah partisipasi dalam bentuk uang, tenaga (gotong royong), pikiran (ide-ide, gagasan). Menurut Alex Nitisemito dalam Syaprizal [6].

Namun yang terjadi di desa kahakitang masyarakat yang ada hanya acu taka cu terhadap pembangunan yang ada dan berfikiran bahwa pembangunan hanya tangujawab pemerintah semata dan dari pemeritahpun kurang melibatkan masyarakat secara menyeluruh, bisa dilihat dari ketikan adanya musyawara, pemerintah hanya mengundang orang tertentu saja.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 dalam pasal 1 ayat 41 menyatakan bahwa partisipasi masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Desa sebagai bagian terkecil dari kepemerintahan mempunyai wewenang dalam merencanakan pembangunan untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya [5]. ada tiga bentuk partisipasi masyarakat dalam perannya, yaitu:

1. **Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan**

Nismawati “Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayahnya perlu ditumbuhkan melalui forum yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi langsung dalam proses pengambilan keputusan terhadap program pembangunan di wilayah setempat”.[10]

Didesa kahakitang masyarakt yang ada kurang antusias untuk mengikuti pertemuan yang diadakan oleh pemerintah bisa dilihat dari sikap masyarakat yang hanya menuggu tidakan dari pemerintah, dan dalam menjalankan air dari sumber penampuang pemerintah memutuskan untuk mengadakan iuaran air, yang terjadi Sebagian masyarakat tidak setuju dan tidak mau membayar iuran air.

1. **Partisipasi dalam Pelaksanaan Pembangunan.**

Nismawati “Diartikan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, perlu adanya pemerataan sumbangan masyarakat dalam bentuk tenaga kerja, uang tunai, dan atau bentuk korbanan lainnya yang sepadan dengan manfaat yang akan diterima oleh masing-masing warga/masyarakat” [10].

Dapat dilihat masyarakat yang ada didesa kahakitang hanya bergantug sepenuhnya pada pemerintah dan tidak mau terlibat berpartisipasi baik tenaga maupun uang dan dari pemerintah pun kuran melibatkan keseluruhan masyarakat dan tidak mau mendengarkan masukan yang lebih baik dari masyarakat.

1. **Partisipasi dalam Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan**

Nismawati “Bentuk partisipasi masyarakat dalam memantau dan mengevaluasi program dan kegiatan pembangunan sangat diperlukan, guna mengetahui apakah tujuan yang dicapai sudah sesuai dengan harapan. Selain itu juga untuk memperoleh umpan balik tentang masalah/kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan yang sedang dilaksanakan.” [10] Yang terjadi di desa kahakitang masyarakat yang ada tidak ada rasa memiliki dan tidak memantau sarana air yang ada seperti tong penampungan keran air yang yang tidak terawat dan suda rusak tidak ada tindakan dari masyarakat untuk memperbaikinya dan juga pipa air yang di tanamkan di laut yang suda mengapung yang membuat terhambatnya proses pengairan, hal ini tidak diperdulikan oleh masyarakat dan hanya menungu tidakan dari pemeritah, dan juga tidak adanya partisipasi terhadap evaluasi sehinga yang terjadi pembanguan sarana prasarana air tidak mencpai tujuan dan hanya dibagun berulang-ulang.

Kemudian dari ke-3 hal ini yang terjadi didesa kahakitang masyarakat hanya mau berpartisipasih kalau mereka di bayar atau diberi upah untuk berpartisipasi dalam setiap Pembangunan-Pembangunan yang ada dalam hal ini pembangunan sarana air bersih, kemudian semangat dalam berpartisipasi masyarakat akan berubah dengan pengeluhan Ketika dalam berpartisipasi tidak ada imbalannya atau di bayar dengan uang. Sedangkan dalam Mendagi “Partisipasi dapat di definisikan secara luas sebagai bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dan sukarela, baik alasan-alasan dalam dirinya (intrinsik) maupun dari luar (ekstrinsik) dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan.” [9]Jadi Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur Sarana Air Bersih Desa Kahakitang Kecamatan Tatoareng Kabupaten Kepulauan Sangihe sangat memperihatinkan atau kurangnya masyarakat dalam berpartisipasi baik dalam bentuk Tenaga, Dana bahkan

51

partisipasi dalam bentuk Pemikiranpun sulit terjadi, Karena Ketika adanya musyawarah untuk membicarakan pembangunan sarana air bersih di desa, Sebagian masyarakat cenderung tidak mau menghadiri dan memberikan pemikiran mereka agar pembangunan sarana air bersih boleh berjalan dengan baik, bahkan bukan cuman masyarakat yang tidak mau berpartisipasih dalam pembangunan bahkan pemerintahpun kurang mengajak masyarakat untuk berpartisipasih.

Pentingnya Partisipasi Masyarakat Menurut Conyers ada tiga alasan utama mengapa partisipasi mempunyai sifat yang penting. [11]

1. Partisipasi masyarakat sebagai alat guna memperoleh informasi mengenai lokasi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, karena tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek‐proyek akan gagal.
2. Bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaan, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut.
3. Merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.

Haridaman dalam Ilham. Berdasarkan asumsi bahwa demokrasi diibaratkan sebagai suatu pola dengan titik gravitasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat [12], maka terdapat tiga proses pentahapan yang harus untuk dilakukan Onny dan Pranarka , sebagai berikut:[13]

1. Tahap Inisial: dari pemerintah, oleh pemeritah, dan untuk rakyat.
2. Tahap Partisipatoris: dari pemerintah Bersama masyarakat, oleh pemerintah Bersama masyarakat , untuk rakyat
3. Tahap Emansipatif: dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, dan didukung oleh pemerintah Bersama masyarakat.

Pada tahap inisial dimana pembangunan yang ada disusun atau direncanakan oleh pemerintah diangarkan oleh pemerintah di laksanakan oleh pemerintah kemudian di serahkan kepada rakyat.

Kemudian pada tahap patisipatoris dimana pembanguan yang ada direncanakan disusun oleh pemerintah dengan masyarakat dan diangarkan oleh pemerintah dan masyarakat dilaksanakan oleh pemerintah Bersama rakayat dan untuk rakyat

Dan tahap emansipatif adalah tahap dimana semuanya dipegang oleh rakyat dan didukung oleh pemerintah.

Dari hasil penelitian di Desa Kahakitang mengenai partisipasi mayarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana air bersih bisa dikatakan pembangunan yang ada berada pada tahap Inisial dimana pembanguanan yang di kuasai oleh pemerintah, pemerintah tidak mau melibatkan masyarakat bahkan Ketika ada masukan yang lebih baik dari masyarakat untuk pembangunan yang ada itu tidak didengarkan oleh pemerintah, karna ada sifat yang tidak mau tersaingi. dari awal Perencanaan yang kurang maksimal sehinga membuat pembangunan infrastruktur dalam hali ini infrastruktur sarana air bersih tidak berjalan dengan baik, dan juga pemerintah hanya mengambil keputusan sepihak tanpa memdengarkan masukan dari masyarakat, kurang melibatkan masyarakat dalam pembangunan yang ada. Kemudian hal ini yang membuat masyarakat memilih diam saja dan hanya menunggu tindakan dari pemerintah.

Mandagi “Proses Pembangunan lebih mengedepankan paradigma poilitik sentralistis dan dominannya peranan negara pada arus utama kehidupan bermasyarakat, sementara keterlibatan masyarakat hanya dalam tataran wacana dan dalam implementasi hanya menjadi sekedar pelengkap proses pembangunan. Akibat dari mekanisme pembangunan yang kurang aspiratif dan tidak partisipatif membuat proses dan hasil menjadi persial dan tidak berkelanjutan. Sebagian besar kegiatan pembangunan merupakan program dari atas (Top Down), sangat berosientasi proyek, dan meninjolkan ego sectoral.” [9]

Partisipasi masayarakat yang ada didesa Kahakitang Kecamatan tatoareng Kabupaten Kepulauan Sangihe tidak berjalan dengan baik salah satunya karena pemerintah desa yang mempunyai sikap yang kurang baik, dari hasil penelitian pemerintah desa kurang melibatkan masyarakat untuk berpendapat atau berpartisipasi dalam bentuk pemikiran, pemerintah desa hanya melibatkan masyarakat dalam bentuk uang/dana, sehinga masyarakat menjadi kurang terlibat untuk berpartisipasi dalam pembangun yang ada di desa.

Mandagi Pada dasarnya pembangunan desa merupakan tanggung jawab Bersama antara pemerintah dan

52

masyarakat, dalam hal ini masyarakat menjadi sasaran sekaligus pelaku pembangunan [9]. Mandagi juga menjelaskan berbagai hasil penelitian melaporkan bahwa banyak program pembangunan perdesaan dimasa lalu dinilai tidak berhasil karena tidak melibatkan masyarakat. [9]

Kemudian Hal ini membuat masyarakat desa kahakitang memiliki sikap yang tidak mau atau kurang berpatisipasi dalam pembangunan infrastriktur sarana air yang ada, masyarakat desa hanya bergantung kepada pemerintah dan terdapat sikap yang hanya diam dan menungu tampa tidak mau melihat pembangun yang ada di desa kahakitang dalam hal ini pembangunan infrastruktur masyarakat hanya acu tak acu dengan pembanguan yang ada dikarenakan sudah bekali-kali pembanguna infrastruktur sarana air bersih ini dibangun tapi tidak mendapatkan hasil yang maksimal sehinga membuat masyarakat desa kecewa dengan pemerintah yang ada dan hanya memilih diam saja. Dalam hasil penelitian yang peneliti temukan proses pembangunan sarana air bersih sudah beberapa kali dibangun, namun tidak ada hasil yang maksimal dan memuaskan untuk masyarakat desa, karena pembangunan sarana air bersih sudah berulang-ulang dibangun tapi kenyataannya tidak membuat masyarakat sejahtera, bahkan pembangunan yang dibuat pemerintah terjadinnya kegagalan dibuat juga Kembali dan dalam bentuk yang sama dan gagal lagi.

Dilapanga (2019) “Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan sebagai suatu kebijakan mencangkup tiga proses kegiatan yaitu formulasi, implementasi dan evaluasi. Proram Pembangunan Infrastruktur yang diusulkan dan di bangun di desa di rumuskan dan ditetapkan melalui musyawara desa.” Apabila dalam hal ini tidak adanya dukungan dari masyarakat atau partisipasi dari masyarakat maka sangat kecil kemungkinan adanya keberhasilan terhadap pembangunan infrastruktur. Dalam hal ini Partisipasi mengenai Uang, Pemikiran dan Tenaga. [14]

Dari hasil penelitian proses pembanguan sarana air bersih yang ada di desa kahakitang berjalan hanya sampai di implemntasi saja tidak sampai evaluasi dan tidak adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat dari awal proses pembangunan. hal ini bisa dilihat dari pembanguan yang ada suda bekali-kali dibangun tapi samapai sekarang tidak ada hasil yang maksimal atau hanya sia-sia saja. Kemudian pemerintah tidak mau mendengar evaluasi yang diberikan oleh masyarakat. Jadi dalam proses pembangunan sarana air bersih pemerintah desa tidak melibatkan masyarakat pada awal perencanaan pembangunan.

Ketika pembangunan dalam pembuatannya dari awal sudah melibatkan masyarakat maka pembangunan tersebut akan jauh lenih baik Yudohusodo [16]. Maka dengan ini apa ayng menjadi harapan, aspirasi dan kebutuhan akan sesuai dengan hasilnya. Lanjut Yudohusodo juga mengatakan “Partisipasi masyarakat memegang peranan kunci bagi kelanjutan suatu hasil pembangunan agar dapat dimanfaatkan dan dinikmati serta menjangkau sebagian besar kebutuhan masyarakat.” [16]

Masyarakat yang tidak mau peduli dengan pembangunan infrastruktur yang ada di desa kahakitang dan hanya bergantung sepenuhnya kepada pemerintah. Jadi partisipasi dari masyarakat untuk pembangunan infrastruktur sarana air bersih di desa kahakitang sangantlah penting dan sangat dibutuhkan untuk mendapatkan hasil yang maksimal, hanya saja yang terjadi dari hasil penelitian masyarakat desa kahakitang kurang melihat hal ini.

Sumiyarsono . “secara garis besar untuk mencapai tujuan yang melibatkan partisipasi masyarakat mencakup pengetahuan (knowledge), sikap (attitude) dan tindakan (action) dari masyarakat itu sendiri.” [15]

Dari hasil penelitian ditemuka juga dalam pembangunan infrastruktur sarana air bersih beberapa lokasi yang digunakan untuk pembuatan sarana air seperti tong untuk penampungan, Paralon dan keran air di tempatkan tidak strategis sehinga mempengaruhi keberhasilan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana air bersih dan yang terjadi sarana tersebut hanya jadi pajangan tidak terpakai. Karena hal tersebut yang terjadi masyarakat bukan berpartisipasi tapi sebaliknya dari hasil penelitian masyarakat tidak menjaga sarana air yang ada mereka malah merusaknya dan tidak mau meperbaiki seperti pipa dan keran air yang ada dan sudah rusak tapi tidak ada sikap mau meperbaiki dari masyarakat, jadi keterlibatan masyarakat sangatlah penting agar dari masyarakat juga ada sikap mau menjaga sarana yang ada

**IV. Kesimpulan**

Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur Sarana Air Bersih di Desa Kahakitang Kecamatan Tatoareng Kabupaten Kepulauan Sangihe masih jauh dari kata berhasil, hal ini dapat dilihat dari

53

Masyarakat yang tidak mau peduli dan tidak ada rasa memiliki dengan pembangunan infrastruktur yang ada di desa kahakitang dan hanya bergantug sepenuhnya kepada pemerintah. Kemudian juga sangat kurangnya untuk berpartisipasi untuk sarana prasana yang ada. Baik itu berpartisipasi dalam perencanaan, pembuatan serta pemeliharan dan evaluasi

Kemudian kepala desa yang mempunyai sifat yang kurang baik, dan cenderung top down. Kepala desa kurang mau melibatkan atau mendengarkan masyarakat, pemerintah desa hanya berperan sendiri tampa mendengarkan pendapat yang lebih baik dari masyarakat dalam pembangunan infrastruktur sarana dan prasarna air bersih. Sehingga masyarakat menjadi kurang terlibat untuk partisipasi dalam pembangunan desa yang ada sehinga yang terjadi pembangunan yang ada tidak berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil Penelitian di atas, maka dalam kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan beberapa Saran atau Rekomendasi agar Partisipasih Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Sarana Air Bersih di Desa Kahakitang Kecamatan Tatoareng Kabupaten Kepulauan Sangihe dapat mencapai keberhasilan dan berjalan dengan maksimal. Partisipasih Masyarakat harus lebih diperhatikan dan ditingkatkan agar bisa mencapai keberhasilan pembangunan yang ada, seperti:

Masyarakat yang harus memiliki rasa memiliki dan peduli terhadap pembangunan infrastruktur yang ada di desa kahakitang dan jangan memiliki sifat yang acuh yang hanya berharap saja kepada pemerintah akan tetapi harus ada partisipasih dari masyarakat Baik itu berpartisipasi dalam perencanaan, pembuatan serta pemeliharan dan evaluasi.

Kepala desa harus mempunyai sifat yang baik dan harus melibatkan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur sarana air bersih yang ada di desa, seperti mendengarkan pendapat/buah pikiran, tenaga, uang dari masyarakat, agar supaya adanya partisipasih masyarakat di dalam pembangunan dan pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana air besih mencapai keberhasilan.

**Daftar Pustaka**

[1] R. R Wrihatnolo, dan R. N Dwidjowijoto, *Manajemen Pembangunan Indonesia.* Jakarta: PT Elex Media Komputiondo, 2006

[2] Undang-undang No 6 *tentang Desa*, Tahun 2014

[3] Peraturan Pemerintah Nomor 122, *Tentang System Penyediaan Air Minum,* Tahun 2015

[4] Undang-Undang Nomor 17 *tentang Sumber Daya,* Tahun 2019

[5] Undang-Undang No 23 t*entang Pengertian Partisipasi Masyarakat*, 2014.

[6] Syaprizal. *Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan.* Skripsi, 2008.

[7] Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif. 2nd edn*. Bandung: Alfabeta, cv. 2018.

[8] S. Kairupan, dan Marthinus Mandagi. *Evaluasi Kebijakan Mendirikan Bangunan di Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa.* Jurnal Administro. UNIMA. vol. 3, no. 1, pp. 35–41, 2021. https://Scholar.google.co.id/citations?user=cqFyLHcAAAAJ&hl=id

[9] M. Mandagi, Perencanaan Pembangunan. Malang: Wineka Media. 2015https://Scholar.google.co.id/citations?user=cqFyLHcAAAAJ&hl=id

[10] Nismawati, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur (Jalan Desa) Di Desa Anabanua Kec. Barru Kab. Barru. Makasar.* Skripsi Universitas Muhamadiyah Makasar. 2020

[11] Conyers, *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga, Suatu Pengantar.* Jakarta:PT. Rineka Cipta. 1984

[12] Ilham *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Tata Kelola Persuteraan*. Banyumas Jawa Tengah: Wawasan Ilmu, 2022

[13] S. P. Onny dan A. M. W. Pranarka. *Pemberdayaan Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta : CSIS, 1996

[14] A. R. Dilapanga, *Evaluasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIPP) di Kecamatan Bolaang Mongondow Timur Kabupaten Bolaang Mongondow.* Jurnal Administro. UNIMA. 2019 https://Scholar.google.co.id/citations?user=-u0DHIwAAAAJ&hl=en

[15] E. Sumiryasono, *Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan prasarana penyediaan air bersih di dessa wawoosu dan desa mataiwoi kecamatan kolono kabupaten konawe selatan provinsi Sulawesi tenggara*. Semarang. Skripsi universitas diponegoro semarang, 2010

54